

PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA SEBAGAI ADAPTASI PEMERINTAH DESA DALAM TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK DI ERA NEW NORMAL

Yuni Lestari¹, Deby Febriyan Eprilianto², Suci Megawati³, dan Trenda Aktiva Oktariyanda⁴

¹D4 Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

^{2,3,4}Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

* Penulis Korespondensi : debyepriyanto@unesa.ac.id

Abstrak

Pandemi Covid-19 menjadikan momentum yang tepat dalam perkembangan digitalisasi pada sektor publik. Segala aktivitas yang dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan, nampaknya mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Pemerintah berupaya untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut, salah satunya dalam pelayanan publik. Perubahan terjadi bukan hanya pada level pemerintah pusat saja, melainkan juga pada level pemerintah desa juga. Sayangnya pemerintah desa mengalami ketidaksiapan dalam mengembangkan e-government, terutama pada aspek sumber daya manusia, infrastruktur teknologi dan kebijakan. Oleh karena diperlukan kerjasama dalam melakukan pengembangan sistem informasi desa. Seperti yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Surabaya dengan Pemerintah Desa Tlemang, Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan. Kerjasama dilakukan melalui program pendampingan tata kelola pemerintahan berbasis digital sebagai upaya adaptasi desa dalam pelayanan publik di era new normal. Kegiatan ini menghasilkan pengembangan sistem informasi desa dengan platform desatlemang.org. Tahapan pada program ini yaitu a) identifikasi masalah dan kebutuhan, b) pengembangan platform sistem informasi desa, c) pelatihan perangkat desa dan masyarakat, dan d) penerapan. Kegiatan pendampingan ini dapat meningkatkan pemahaman perangkat desa dan masyarakat akan pemanfaatan dan pengelolaan platform sistem informasi desa yang telah dikembangkan. Harapan platform sistem informasi desa ini dapat dimanfaatkan oleh perangkat desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat di era new normal ini.

Kata kunci: *E-government, Sistem Informasi Desa, Pelayanan Publik, Pendampingan Desa, New Normal*

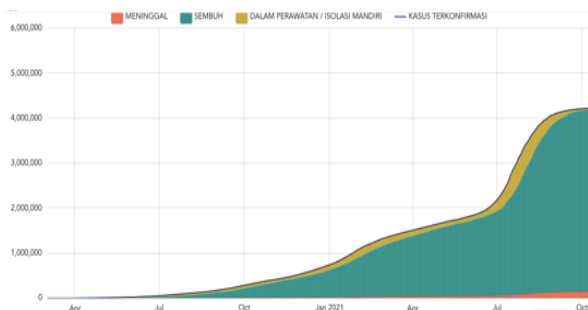
Abstract

The Covid-19 pandemic has provided the necessary impetus for the advancement of digitalization in the public sector. All aspects of government administration appear to have undergone extraordinary changes. The government is attempting to adapt to these changes, one of which is in the provision of public services. Change occurs not only at the national level, but also at the village level. Unfortunately, the village government is unprepared to implement e-government, particularly in terms of human resources, technology infrastructure, and policies. As a result, collaboration is required in the development of village information systems. This is what the Surabaya State University community service team did with the Tlemang Village Government, Ngimbang District, Lamongan Regency. The collaboration is carried out through a digital-based governance assistance program in an effort to adapt villages in public services in the new normal era. This activity resulted in the creation of a village information system on the desatlemang.org platform. This program includes the following stages: a) problems and needs, b) development of village information system platforms, c) training of village officials and communities, and d) implementation. This mentoring activity can help village officials and the community better understand how to use and manage the village information system platform that has been developed. It is hoped that village officials will be able to use this village information system platform to provide public services to the community in this new normal era.

Keywords: *E-government, Village Information System, Public Services, Village Assistance, New Normal*

1. PENDAHULUAN

Nyatanya danya pandemi Covid-19 diberbagai negara memberikan dampak perubahan yang luar biasa pada semua sektor. Bukan hanya di Indonesia trend kasus Covid-19 dari hari kehari, bulan kebulan mengalami pergerakan lonjakan yang sangat luar biasa. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 (Muhyiddin, 2020). Seperti data dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2021 masih mengalami lonjakan kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Meskipun trend tersebut dari bulan April hingga Oktober 2021 juga diiringi dengan jumlah pasien sembuh yang meningkat, sedangkan jumlah pasien yang meninggal sudah mulai landai dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Setyorini, 2020). Data trend perkembangan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia tahun 2021 dapat dilihat pada gambar dibawah ini berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan.

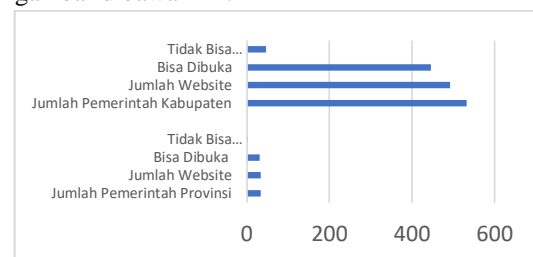


Gambar 1: Trend Perkembangan Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia Tahun 2021

Berbagai upaya telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka menekan kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Upaya tersebut dilakukan untuk memulihkan kembali aktivitas masyarakat yang lumpuh akibat pandemi Covid-19.

Salah satu aktivitas yang terdampak dari adanya pandemic Covid-19 yaitu aktivitas penyelenggaraan pemerintahan (Wahidah, dkk, 2020). Baik pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah (pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota) tidak luput terdampak dalam menyelenggarakan aktivitas pemerintahannya. Berbagai upaya telah dilakukan seperti *work from home* dan sebagainya untuk tetap menjalankan aktivitasnya.

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi nampaknya menjadi primadona dimasa saat ini. Pada kajian administrasi negara disebut sebagai konsep e-government dan mulai berkembang menjadi governansi digital (Heek, 2011). Konsep pemerintahan digital sebenarnya bukan menjadi hal baru pada sektor publik. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government sudah mulai dikembangkan oleh sektor publik, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Meskipun perkembangan e-government ini sangat beragam (Nugroho, 2020). Dari data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa hampir semua pemerintah, baik pusat maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota) telah mengembangkan website, tetapi masih terdapat beberapa website pemerintah yang tidak dapat diakses. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. Jumlah Website Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

Data di atas menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya mengembangkan dan mengimplementasikan e-government meskipun hasilnya sangat beragam diberbagai daerah. Hal ini dikarenakan kesiapan setiap daerah yang berbeda-beda. Meskipun demikian, ini menjadi perhatian yang serius bagi setiap pemerintah daerah supaya dapat mengembangkan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahannya (Eprilianto, dkk, 2019 dan Apriyansyah, dkk 2018).

Seperti yang disampaikan Eprilianto, dkk (2019) bahwa saat ini perkembangan e-government telah berkembang menjadi berbasis aplikasi dengan berbagai platform sesuai dengan kebutuhan dan

kondisi daerahnya masing-masing. Hal ini menjadikan keberagaman perkembangan e-government pada setiap daerah di Indonesia. Terdapat pemerintah daerah yang serius dalam melakukan pengembangan e-government, tetapi ada juga yang terkesan kurang serius. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor yang disebut sebagai keterbatasan dalam pengembangan e-government. Dari banyak keterbatasan tersebut, biasanya dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi.

Pandemi Covid-19 memberikan banyak perubahan dalam tata kelola pemerintahan. Jika dikaitkan dengan perkembangan e-government, nampaknya momen ini memberikan arti yang luar biasa pada perubahan tata kelola pemerintahan, khususnya percepatan digitalisasi sektor publik pada setiap level dan sektor pemerintah. Tidak ada yang bisa menghindari dari keharusan beradaptasi terhadap digitalisasi supaya tetap dapat melakukan aktivitas penyelenggaraan sektor publik (Adam, 2020). Terutama pada penyelenggaraan urusan pelayanan publik.

Bagi pemerintah yang sebelumnya sudah sukses mengembangkan e-government, nampaknya sangat mudah untuk beradaptasi dengan kondisi saat ini. Tetapi tidak bagi pemerintah yang enggan untuk mengembangkan e-government sedari dulu, nampaknya momentum saat ini dijalani dengan sangat berat. Membutuhkan upaya dan strategi supaya dapat menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Seperti pemerintah desa, yang merupakan aktor utama dan dasar yang paling dekat dengan masyarakat. Nyatanya banyak pemerintah desa yang sempoyongan menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini. Apalagi bagi pemerintah desa yang notabene-nya secara geografis tidak cukup mendukung untuk dikembangkan e-government.

Selain kondisi tersebut, nampaknya keberadaan sumber daya manusia (perangkat desa) yang kurang mumpuni untuk mengembangkan e-government, ditambah dengan keterbatasan infrastruktur teknologi yang merupakan kunci sukses dalam pengembangan e-government (Kumar, dkk, 2018). Keterbatasan tersebut nampaknya dialami hampir semua pemerintah desa di Indonesia, khususnya di daerah yang bukan metropolitan.

Keterbatasan tersebut bukan menjadi alasan bagi pemerintah desa untuk berusaha mengembangkan

e-government dalam rangka adaptasi tata kelola pemerintahan berbasis digital di era new normal saat ini. Kesadaran akan keterbatasan tersebut, seharusnya dapat dijadikan pedoman/dasar dalam menyusun strategi pengembangan e-government di lingkungan pemerintah desa. Seperti halnya pada Pemerintahan Desa Tlemang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan.

Pemerintah desa menyadari keterbatasan yang dimiliki dalam mengembangkan e-government, sedangkan pengembangan tersebut sangat dibutuhkan pada kondisi saat ini. Strategi yang diambil yaitu dengan mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki yaitu pemuda yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Surabaya, yang kemudian mengantarkan adanya kerjasama dengan tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Surabaya untuk melakukan program pendampingan tata kelola pemerintahan berbasis digital sebagai upaya adaptasi desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik di era new normal.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan topik pendampingan sistem informasi desa sebagai adaptasi pemerintah desa dalam tata kelola pelayanan publik di era new normal ini antara lain yaitu a) identifikasi masalah dan kebutuhan melalui *focus discussion group* (FGD), b) pengembangan sistem informasi desa, c) pelatihan perangkat desa melalui pemaparan materi pengenalan sistem informasi desa, dan d) penerapan sistem informasi desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Pemerintah Desa Tlemang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan.

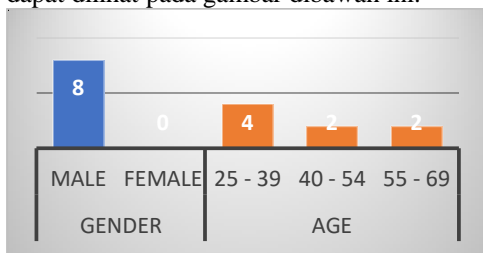
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis digital sebagai upaya adaptasi desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik di era new normal ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan dilakukan untuk dapat mengembangkan platform sistem informasi desa yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari Pemerintah Desa Tlemang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Tahapan-tahapan tersebut antara lain a) tahap identifikasi masalah dan kebutuhan, b) tahap pengembangan platform digital, c) tahap pelatihan perangkat desa, dan d) tahap penerapan. Tahapan tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu proses yang tidak terputus. Penjelasan terhadap tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tahap Identifikasi Masalah dan Kebutuhan

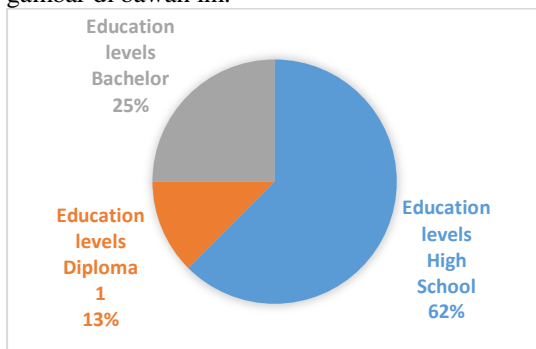
Tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Surabaya. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesiapan Pemerintah Desa Tlemang dalam melakukan pengembangan sistem informasi desa melalui identifikasi masalah dan kebutuhannya. Setidaknya ada 3 pokok bahasan yang dapat dihasilkan pada tahap ini yaitu identifikasi kesiapan sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur teknologi, dan kesiapan kebijakan. Dimana ketiga bahasan tersebut merupakan kendala/keterbatasan yang dialami oleh Pemerintah Desa Tlemang.

Kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor yang penting yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan e-government. Faktor ini memberikan kontribusi dalam keberhasilan pengembangan dan penerapannya. Dari hasil data dilapangan menunjukkan bahwa dari aspek kesiapan sumber daya manusia di Desa Tlemang sebenarnya dalam aspek jumlah sudah sangat memenuhi. Data jumlah perangkat desa di Pemerintah Desa Tlemang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3. Jumlah Perangkat Desa di Desa Tlemang

Dari identifikasi ketersediaan aspek sumber daya manusia atau perangkat desa tersebut didapatkan bahwa dari aspek jumlah sudah cukup memenuhi untuk melakukan pengembangan, tetapi jika di analisis lebih dalam lagi dari jumlah perangkat desa tersebut belum cukup memenuhi dari aspek kemampuan dan keterampilannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil identifikasi perangkat desa berdasarkan tingkat pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh perangkat desa. Data tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4. Jumlah Perangkat Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan perangkat desa didominasi oleh lulusan SMA sederajat. Hanya 2 orang saja yang lulusan program Sarjana. Sedangkan dari data dilapangan menunjukkan bahwa belum ada perangkat desa yang pernah mengikuti pelatihan keterampilan apapun. Hal ini jika dianalisis menjadi kendala yang berarti dalam melakukan pengembangan sistem informasi desa secara mandiri.

Selanjutnya dari hasil identifikasi kesiapan sumber daya manusia (perangkat desa) di Desa Tlemang tersebut dikaitkan dengan sumber daya manusia dari tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Surabaya. Tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Surabaya terdiri dari empat orang yang memiliki keseriusan dalam melakukan kajian terhadap pelayanan publik dalam sektor publik. Data tim pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut.



Gambar 5. Jumlah Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Keahlian dan Konsentrasi

Dari hasil identifikasi tersebut, maka masalah yang dihadapi oleh perangkat desa yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan perangkat desa dapat dibantu oleh ketersediaan sumber daya manusia dari tim pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh tim dapat digunakan untuk membantu perangkat desa dalam mengembangkan sistem informasi desa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini.

Aspek berikutnya yaitu kesiapan infrastruktur teknologi yang dibutuhkan dalam mendukung pengembangan dan penerapan sistem informasi desa. Dari data dilapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tlemang telah tersedia infrastuktur teknologi yang cukup memadai. Dari hasil identifikasi yang

dilakukan infrastruktur teknologi yang tersedia sebagai berikut.

Tabel 1: Jumlah Infrastruktur Teknologi di Desa Tlemang

Nama Perangkat	Jumlah	Spesifikasi
Komputer	2 unit	CPU Core I3, Ram 6 Gb, Intel HD Graphic 1,6 Gb, dan HDD 512 Gb
Wifi	1 unit	koneksi Speedy Indihome Speed 30 mbps
Laptop	1 unit	Core I5, Ram 4 Gb, dan HDD 256 Gb
Printer	1 unit	Epson L565

Ketersediaan infrastruktur teknologi di Desa Tlemang cukup memadai untuk mendukung penerapan sistem informasi desa. Hanya yang belum dimiliki oleh aplikasi *software* untuk mendukung penerapan sistem informasi desa. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, maka tim pengabdian kepada masyarakat melakukan pengembangan aplikasi *software* yang akan digunakan oleh perangkat Desa Tlemang dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Aplikasi tersebut didukung dengan ketersediaan infrastruktur teknologi yang tersedia di Desa Tlemang.

Terakhir dari aspek kebijakan, dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim menunjukkan bahwa belum ada peraturan desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa Tlemang untuk mendukung pengembangan dan penerapan sistem informasi desa. Kebijakan yang digunakan sebagai pedoman yaitu peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Lamongan) yang terkait dengan pengembangan e-government. Kebijakan-kebijakan yang digunakan sebagai pedoman dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2: Kebijakan dalam Pengembangan E-government

Pemerintah Pusat	Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007

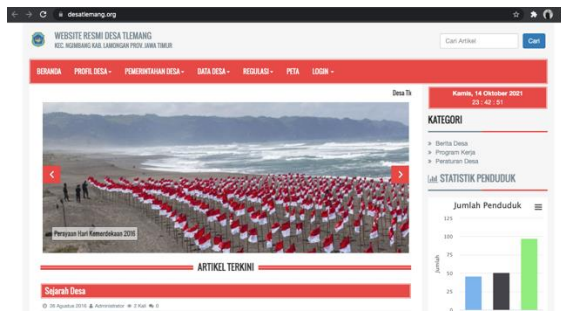
	tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan
	Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan
	Undang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
	Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024
Pemerintah Kabupaten Lamongan	Peraturan Bupati Lamongan Nomor 31 tahun 2018 tentang Desa Karakter Unggul dan Pintar

Dari data tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tlemang seharusnya dapat membuat peraturan desa yang memuat tentang pengembangan dan penerapan sistem informasi desa. Kebijakan tersebut dibuat untuk dijadikan pedoman teknis dalam penerapannya di level desa. Supaya perangkat desa dan masyarakat dapat dengan mudah memahami tentang sistem informasi desa.

b. Tahap Pengembangan Platform Digital Sistem Informasi Desa

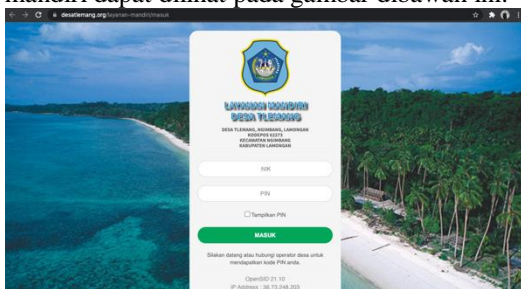
Tahap pengembangan platform digital sistem informasi desa ini merupakan tahap lanjutan yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Surabaya. Tahap ini dilakukan melalui pembuatan dan pengembangan sistem informasi desa yang disesuaikan dengan analisis kebutuhan dari Pemerintah Desa Tlemang. Setidaknya terdapat 3 kebutuhan utama yang disampaikan oleh pemerintah desa yaitu a) keterbatasan media dalam pelayanan publik seperti pengurusan surat keterangan meninggal, lahir, pindah penduduk, dsb, b) keterbatasan media informasi pokok desa seperti data profil desa, berita desa, pengumuman, potensi desa, dsb, dan c) keterbatasan media pengelolaan data desa.

Dari hasil identifikasi tersebut, maka tim pengabdian kepada masyarakat berupaya untuk membuat dan mengembangkan sistem informasi desa yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Platform yang dikembangkan oleh tim berbasis digital dengan url sebagai berikut desatlemang.org. Tampilan *interface* dari sistem informasi desa yang telah dikembangkan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



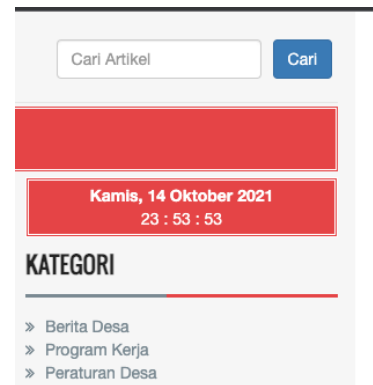
Gambar 6. Tampilan *Interface* Sistem Informasi Desa Tlemang

Pengembangan yang dilakukan sudah diupayakan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Desa Tlemang. Pada platform sistem informasi desa tersebut telah dilengkapi dengan fitur pelayanan publik mandiri. Fitur ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Tlemang untuk melakukan pelayanan publik secara mandiri melalui perangkat sendiri bisa laptop, komputer maupun HP. Fitur ini juga dapat diakses oleh masyarakat hanya dengan mengisi NIK dan PIN yang diberikan oleh operator desa, sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh masyarakat. Tampilan fitur pelayanan publik mandiri dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 7. Tampilan Fitur Pelayanan Publik Mandiri

Selain itu dalam platform sistem informasi desa juga dilengkapi dengan fitur media informasi. Fitur ini dapat dimanfaatkan oleh perangkat desa untuk menyampaikan berbagai macam informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Informasi tersebut seperti profil desa, berita desa, regulasi desa, potensi desa dsb. Tentunya fitur ini hanya dapat dikelola oleh operator atau perangkat desa saja yang kemudian dapat diakses oleh masyarakat luas. Tampilan menu media informasi desa ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 8. Tampilan Fitur Media Informasi Desa

Fitur terakhir yang berhasil dikembangkan oleh tim yaitu fitur pengelolaan data desa. Fitur ini dapat dimanfaatkan oleh perangkat desa dalam mengelola/mengolah data desa mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyajian dan *update* data desa dengan mudah. Fitur ini juga hanya dapat diakses oleh perangkat atau operator saja. Sedangkan hasil dari fitur pengelolaan data desa berupa bagan/grafik yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Tampilan fitur ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



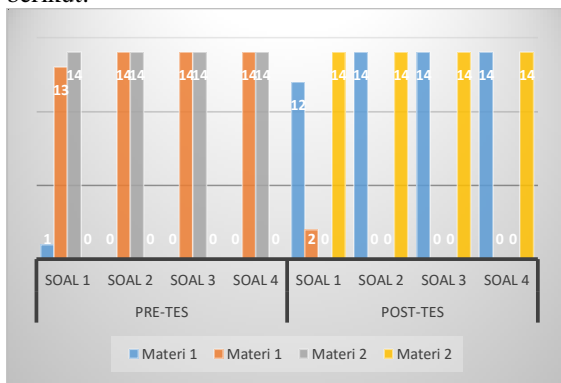
Gambar 9. Tampilan Fitur Pengelolaan Data Desa

Selain fitur-fitur tersebut dalam platform sistem informasi desa ini juga dilengkapi dengan fitur kolom interaksi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat berinteraksi dengan pemerintah desa. Masyarakat hanya perlu menuliskan sesuai dengan keperluannya di kolom *chat* yang tersedia pada platform yang kemudian dapat direspon oleh perangkat desa atau operator.

c) Tahap Pelatihan Perangkat Desa

Tahap pelatihan ini ditujukan utamanya kepada perangkat desa yang akan menjadi operator sistem informasi desa yang telah dikembangkan. Tetapi dalam tahap ini masyarakat melalui perwakilannya yang telah ditentukan oleh perangkat desa yang terdiri dari kepala dukuh, kepala RW dan perwakilan karang taruna juga diikuti dalam pelatihan ini. Pelatihan dilakukan oleh tim di bala Desa Tlemang secara terpusat melalui penyampaian materi, pendampingan dan *focus group discussion*.

Tahap ini penting untuk dilakukan oleh tim untuk *transfer* pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan dan pemanfaat platform sistem informasi desa yang telah dikembangkan. Materi yang disampaikan antara lain materi tentang pentingnya tata kelola pemerintahan desa berbasis digital (*e-government*), dan materi pengenalan dan pengelolaan fitur sistem informasi desa yang telah dikembangkan. Dalam pelatihan ini dilakukan pre-tes dan post-tes untuk mengukur sejauh mana efektivitas pelatihan yang telah dilakukan. Dari hasil pre-tes dan post-tes menunjukkan bahwa pelatihan memberikan manfaat yang berarti dalam meningkatkan pemahaman perangkat dan masyarakat akan materi *e-government* dan materi pengenalan dan pengelolaan sistem informasi desa. Hasil pre-tes dan post-tes sebagai berikut.



Gambar 10. Hasil Pre-tes dan Post-tes Pelatihan

Dari hasil identifikasi hasil pre-tes dan post-tes yang telah dilakukan baik untuk materi pertama dan kedua telah terlihat dampak/manfaat perubahan pemahaman pada perangkat desa dan masyarakat. Materi pertama dengan hasil sebagai berikut : a) soal pertama terkait pengertian konsep *e-government*/digitalisasi sektor publik pre-tes hanya 1 orang yang menjawab benar dan post-tes 12 orang menjawab benar, b) soal kedua tentang manfaat *e-government* pre-tes tidak ada yang menjawab benar dan post-tes 14 orang menjawab benar, c) soal ketiga tentang model *e-government* pre-tes tidak ada yang menjawab benar dan post-tes 14 orang menjawab benar, dan d) soal keempat tentang faktor yang mempengaruhi *e-government* pre-tes tidak ada yang menjawab benar dan post-tes 14 orang menjawab benar.

Sedangkan untuk materi yang kedua tentang pengenalan dan pengelolaan sistem informasi desa juga terlihat manfaat yang diperoleh dari meningkatnya pemahaman perangkat desa dan masyarakat. Materi kedua dengan hasil sebagai berikut : a) soal pertama tentang pernah mengakses sistem informasi desa pre-tes belum ada yang pernah dan post-tes 14 orang pernah mengakses, b) soal kedua

fitur yang ada pada sistem informasi desa pre-tes tidak ada yang menjawab benar dan post-tes 14 orang menjawab benar, c) soal ketiga tentang kegunaan sistem informasi desa pre-tes tidak ada yang menjawab benar dan post-tes 14 orang menjawab benar, dan d) soal keempat tentang cara mengakses fitur pada sistem informasi desa pre-tes tidak ada jawaban yang benar dan post-tes 14 orang menjawab benar.

Hasil pre-tes dan post-tes ini menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan kepada perangkat desa dan masyarakat telah memberikan manfaat pada peningkatan pemahaman. Dengan demikian diharapkan setelah mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh tim ini perangkat desa dan masyarakat dapat memanfaatkan, mengelola dan mengakses platform sistem informasi desa yang telah dikembangkan. Sehingga platform sistem informasi desa ini dapat memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Desa Tlemang kepada masyarakat di era *new normal* ini.

Kegiatan pelatihan tidak berhenti sampai tahap ini, pendampingan terus dilakukan oleh tim kepada perangkat desa melalui *Whatsap group* yang telah dibuat dengan beranggotakan tim dan semua perangkat desa. Media ini dianggap paling tepat untuk dapat memfasilitasi perangkat desa dalam menjali komunikasi dengan tim terkait dengan pengelolaan sistem informasi desa yang telah dikembangkan.

d) Tahap Penerapan.

Tahap penerapan merupakan tahap terakhir dari kegiatan pendampingan tata kelola pemerintahan berbasis digital sebagai upaya adaptasi desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik di era *new normal* pada Pemerintah Desa Tlemang. Tahap ini dapat dikatakan sebagai tahap pemanfaatan platform sistem informasi desa yang telah dikembangkan. Platform ini digunakan oleh perangkat desa dalam melakukan pelayanan publik, pemberian informasi publik dan pengelolaan data desa.

Belum dapat dilihat seberapa jauh atau efektivitas dari penerapan platform sistem informasi desa ini. Hal ini dikarenakan platform ini masih baru sekali digunakan oleh perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Tim pengabdian akan melakukan evaluasi secara bertahap dalam proses penerapan platform sistem informasi desa di Desa Tlemang ini. Media yang telah dibuat dapat digunakan sebagai media komunikasi yang efektif antara tim dengan perangkat desa dalam rangka memastikan platform sistem informasi desa ini dapat diterapkan secara optimal. Sampai artikel ini ditulis belum ada kendala yang berarti yang disampaikan

oleh perangkat desa kepada tim, yang cukup dapat diambil kesimpulan bahwa perangkat desa sampai saat ini dapat mengoperasikan dan memanfaatkan platform sistem informasi desa ini dengan baik.

4. KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan tata kelola pemerintahan berbasis digital sebagai upaya adaptasi desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik di era new normal pada Pemerintah Desa Tlemang, Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dapat dilakukan dengan baik. Hal ini didasarkan pada tahapan kegiatan yang dilakukan yaitu tahap identifikasi masalah dan kebutuhan, tahap pengembangan platform sistem informasi desa, tahap pelatihan perangkat desa dan masyarakat dan tahap penerapan dilakukan dengan baik. Pengembangan sistem informasi desa telah disesuaikan dengan analisis kebutuhan, masalah dan ketersediaan/kesiapan Pemerintah Desa Tlemang dari aspek sumber daya manusia, infrastruktur teknologi dan kebijakan. Pengembangan platform sistem informasi desa setidaknya terdapat tiga fitur utama yaitu fitur pelayanan publik, fitur informasi publik, dan fitur pengelolaan data desa. Dilanjutkan dengan pelatihan yang dilakukan oleh tim untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa dan masyarakat. Besar harapan tim, platform yang sudah dikembangkan dapat diterapkan secara optimal oleh perangkat desa dan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Surabaya yang telah memberikan kesempatan dan pendanaan kepada tim sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Ibrahim Osman. 2020. Examining E-government. Development Effects on Corruption in Africa : The Mediating Effects of ICT Development and Institutional Quality. *Technology in Society Journal*
- Apriyansyah, dkk. 2018. Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. *JAKKP : Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik Volume 4 Nomor 1 Juni 2018*
- Eprilianto, Deby Febriyan, dkk. 2019. Mewujudkan Integrasi Data Melalui Implementasi Inovasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Digital. *Journal Public Sector Innovation : Volume 4 Nomor 1 November 2019*
- Heeks, Richard. 2011. Understanding E-government for Development. *Jurnal : Institute for Development Policy and Management University of Manchester*
- Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government
- Kumar, R., A. Sachan and A. Mukherjee. 2018. Direct vs indirect e-government adoption: an exploratory study. *Digital Policy, Regulation and Governance 20 (2)*
- Muhyiddin. 2020. Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan : The Indonesian Journal of Development Planning Volume 4 Nomor 2 Juni 2020*
- Nugroho, Rossi Adi. 2020. Kajian Analisis Model E-Readiness dalam Rangka Implementasi E-Government. *Masyarakat Telematika dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi Volume 11*
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 31 tahun 2018 tentang Desa Karakter Unggul dan Pintar
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 147.1-4717 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan
- Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Setyorini, Dini. 2020. Analisa Tren yang Terkonfirmasi Covid-19 Awal Tahun 2021 di Indonesia. *Jurnal Mitra Manajemen Volume 4 Nomor 12 Desember 2020*
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Wahidah, Idah, dkk. 2020. Pandemi Covid-19 : Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan. *JMO : Jurnal Manajemen dan Organisasi Volume 11 Nomor 3 Desember 2020*